



Hindari Munculnya SMK Bernuansa Teori

YOGYA (KR) - Kondisi perekonomian yang belum stabil secara tidak langsung menjadikan animo masyarakat untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih besar. Meningkatnya animo masyarakat untuk ke SMK secara otomatis memengaruhi jumlah pendaftar di SMA (terjadi penurunan).

Tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif dan adanya keluhan dari beberapa SMA swasta khususnya yang ada di daerah pinggiran menjadikan pemerintah terinspirasi meningkatkan persentase SMK. Kendati demikian supaya alih fungsi itu tidak hanya memunculkan SMK-SMK teori, biaya operasional dan filosofi harus jelas.

Hal itu dikemukakan oleh Pakar Pendidikan dari Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa (UST) Prof Dr Djohar MS dan Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogya, Drs Wahyuntono yang ditemui *KR* secara terpisah,

Selasa (26/8).

Djohar mengatakan, pada-prinsipnya dirinya mendukung rencana pemerintah untuk meningkatkan persentase SMK. Dengan catatan rencana tersebut harus dipertimbangkan secara matang dan cermat. Pasalnya jika rencana itu hanya mengejar sesuatu yang sifatnya sesaat hasilnya tidak akan menguntungkan. Untuk menghindari hal itu pemerintah dan *stakeholder* perlu mempertimbangkan biaya operasional yang dibutuhkan dan target yang ingin dicapai.

"Memang kalau dikaitkan dengan

pekerjaan lulusan SMK mempunyai peluang lebih besar daripada SMA karena sudah dibekali *skill*. Tapi perlu diingat pendidikan tidak hanya berorientasi pada pekerjaan tapi juga pembangunan manusia seutuhnya," kata Djohar.

Lebih lanjut Rektor UST itu menambahkan, perubahan komposisi antara SMA dan SMK akan bisa optimal dan sesuai dengan target yang sudah ditentukan apabila diimbangi dengan persiapan dari pengelola Perguruan Tinggi (PT). Hal itu penting karena selama jumlah PT yang memiliki Program Studi (Prodi) sesuai dengan keahlian yang ada di SMK jumlahnya masih terbatas.

"Saya khawatir jika rencana perubahan komposisi itu tidak diimbangi dengan kesiapan dari PT dan sekolah yang bersangkutan justru menimbulkan persoalan baru dalam dunia pendidikan. Sebab berdasar-

kan pengalaman, kelompok yang jumlahnya tidak banyak akan menjadi minoritas," terangnya, seraya menambahkan, penambahan anggaran sebesar 20 persen dari total APBN perlu diimbangi dengan perencanaan yang cermat.

Terpisah Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, Drs Wahyuntono menyambut baik usulan perubahan perbandingan SMA:SMK. Sebab di negara berkembang seperti Indonesia sekarang ini sangat membutuhkan tenaga terampil. Tenaga tersebut bisa diambilkan dari lulusan SMK.

"Sangat memungkinkan sekali ada sejumlah SMA yang berubah menjadi SMK. Namun tidak mudah itu harus memerhatikan biaya operasionalnya. Karena, biaya operasional SMA dengan SMK berbeda, *cost*nya lebih besar SMK, misalnya untuk membeli alat-alat praktikum," jelasnya.

(R-5/R-3)-k

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth :

INSTANSI	NILAI BERITA	SIFAT	
1. <i>Din. Pendidikan</i>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat segera	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/>
3.			<input type="checkbox"/> Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005